

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Amanina pada tahun 2011 yang berjudul “Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi Pada Pt. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk Cabang Majapahit Semarang). Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian internal pada pemberian kredit nya masih kurang efektif. Karena dalam pemberian kredit mikro pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang terdapat kelemahan yang masih terjadi yaitu dalam hal jumlah karyawan untuk posisi Mikro Kredit Analis (MKA) masih perlu adanya penambahan personel.

Penelitian Samosir pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis Efektivitas Pengendalian Pemberian Kredit pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sidikalang”. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang terkait dengan pemberian kredit nya sudah sangat efektif, pengendalian intern nya pun sudah efektif juga. Namun adanya terjadi kredit macet yang disebabkan oleh faktor eksternal (pihak nasabah).

Penelitian Iza Azmi Alfinovita dan Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE., Mcom-Horns, CSRS, PH.D yang berjudul “. Terhadap Kinerja Perkreditan pada Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto di Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pemberian kredit nya telah sesuai dengan pedoman atau

standar pemberian kredit oleh perbankan yang diterapkan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengendalian pada PT. BPR Nusumma Jatim ini telah memadai.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan membahas dan menganalisa lagi keefektifan sistem pengendalian internal PT. Bank Jatim Gresik. Dalam mengevaluasi keefektifan pengendalian internal nya dengan membandingkan COSO Statement.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan sistem aturan suatu organisasi atau badan usaha yang memiliki tujuan untuk mencapai target perusahaan dengan pelaksanaan kegiatan usaha. Segala aktivitas dapat di pantau dengan baik dengan adanya sistem pengendalian internal, alasan nya karena sistem pengendalian internal merupakan keyakinan akan tercapai nya target perusahaan dengan kebijakan terhadap pengendalian sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen.

Pengendalian internal juga merupakan suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua cara dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan.(Marshall dan Paul, 2014)

Sistem pengendalian internal memiliki peran penting yaitu membantu manajemen dalam mengatur dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi, menciptakan pelaksanaan control, dan melakukan pencegahan atas kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.

Menurut (Sujarweni, 2015) Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, cara dan ukuran-ukuran yang di koordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mencocokkan ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan SE No.5/22/DPNP, dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang layak dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam lembaga tersebut.

Menurut (Marshall dan Paul, 2014) COSO (*Committee of Sponsoring Organization*), pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau tahapan yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan sebagai penyedia jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai melalui efektifitas, efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Terdapat lima komponen sistem pengendalian internal yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Internal Environment*)

Atmosfir dimana manajemen dan karyawan melaksanakan kegiatannya dan melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengendalikan organisasi. Lingkungan pengendalian yang efektif adalah lingkungan dimana terdapat orang-orang yang berpengalaman yang memahami. Tanggung jawabnya dan batasan atas wewenang, mengetahui, mendalami dan berkomitmen untuk melakukan hal-hal

yang tepat dengan cara yang benar, dan mempunyai komitmen untuk mengikuti kebijakan, prosedur, dan standar etika organisasi.

2. Kegiatan pengendalian (*Control Activities*)

Langkah-langkah yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian target dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai kegiatan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda seperti otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi.

COSO menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian yaitu :

- a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tahap yang diterima.
- b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
- c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

3. Penafsiran Risiko (*Risk Assessment*)

Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikendalikan. Manajemen risiko menganalisis hubungan risiko asersi spesifik laporan keuangan dengan aktivitas seperti pencatatan, pemrosesan, pengikhtisaran, dan pelaporan data-data keuangan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengidentifikasian, pemahaman, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi cara untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas asset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian internal.

5. Pengawasan (*Monitoring*)

Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah.

2.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal (*internal control*) juga merupakan proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa target-target pengendalian telah dicapai. (Marshall dan Paul, 2014) Tujuan-tujuan pengendalian tersebut yakni :

1. Mengamankan aset, mencegah atau menemukan perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah
2. Mengelola catatan dengan teliti yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar
3. Memberikan informasi yang akurat dan reliable
4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional
6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan
7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

2.2.3 Unsur Sistem Pengendalian Internal

Agar dapat berjalan dengan baik, sistem pengendalian internal harus memiliki unsur-unsur pokok yaitu : (Puspitawati, 2011)

1. Struktur organisasi

merupakan suatu struktur pembagian tanggung jawab menurut fungsi dan kedudukan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memiliki tujuan sebagai wadah perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya
3. Pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang kompeten yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya.

2.2.4 Elemen Sistem Pengendalian Internal

Di dalam sistem pengendalian internal terdapat elemen- elemen (Elly Suhati dan Siti Kurnia Rahayu, 2010), yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian dari suatu organisasi memfokuskan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian

2. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen.

3. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari:

a. Penggunaan wewenang

Digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau transaksi. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terlaksana atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang menyusun pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

b. Pembagian tugas.

Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. penyimpanan.

c. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.

Prosedur harus mencakup penerkaan dan penggunaan dokumen dan catatan yang layak untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara layak. Selanjutnya dokumen dan catatan yang layak nantinya akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi. (biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat)

d. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan.

Keamanan yang layak meliputi penentuan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data/informasi perusahaan.

e. Pengecekan independen terhadap kinerja.

Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas pemeriksaan.

4. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Semua organisasi mempunyai risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah dikelompokkan dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

5. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan pengawasan dibutuhkan oleh manajemen pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Nilai kredit untuk menentukan predikat kesehatan bank ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Kesehatan Nilai Kredit Bank

Nilai Kredit	Predikat
81 – 100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

Sumber : Hermawan, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Bumi Aksara)

Nilai-nilai kredit yang digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan bank diatas, perlu diadakan penyesuaian dengan memperhitungkan ada atau tidaknya suatu faktor, komponen faktor, dan aspek manajemen di cabang perbankan.

Nilai kredit untuk penilaian tingkat kesehatan cabang perbankan tanpa faktor permodalan :

Tabel 2.2
Tingkat Kesehatan Nilai Kredit Bank Percabangan

Nilai Kredit	Predikat
64,80 – 80	Sehat
52,80 - < 64,80	Cukup Sehat
40,80 - < 52,80	Kurang Sehat
0 - <40,80	Tidak Sehat

Sumber : Hermawan, Manajemen Perbankan (Jakarta:PT. Bumi Aksara)

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menetapkan nilai kredit maksimal, dengan mengubah range nilai kredit secara proporsional sesuai range yang ditetapkan dalam formula PAKTRI.

2.4 Pemberian Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit

Menurut (Kasmir, 2014) Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunga nya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.(Hermawan, 2012)

UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I, Pasal 1 ayat (12), menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang nya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Suyatno, 2007)

Sedangkan menurut (Hermawan, 2012), pengertian kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunga nya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Kredit

Fungsi kredit bagi masyarakat yaitu : (Suyatno, 2007)

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
5. Meningkatkan daya guna barang
6. Memperbesar modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

Sedangkan tujuan dari penyaluran kredit antara lain :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Menambah modal kerja perusahaan.

2.4.3 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

(Hermawan, 2012) ”Sebelum kredit diberikan, bank harus memiliki kepercayaan bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut diberikan. ”

Kriteria yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7p. Adapun penjelasan analisis 5C kredit adalah :

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini dilihat dari latar belakang nasabah baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan dalam bidang bisnis yang berkaitan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Serta kemampuannya dalam menjalankan usaha.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dengan dilihat laporan keuangannya dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan

juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hal yang harus diperhatikan juga dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa depan yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor usaha yang dijalankan.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P, yaitu :

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya setiap hari ataupun masa lalu nya.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Untuk mengetahui maksud dari nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Untuk mengukur usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuan nya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.4.4 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut (Suyatno, 2007) Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan kebijakan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuan apakah konsumtif atau produktif. (Hermawan:2012)

Prosedur pemberian kredit, antara lain :

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang diwujudkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pada pengajuan proposal kredit berisi :

- a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus serta pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- b. Maksud dan tujuan, yang berisi apakah untuk mengembangkan omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta target lainnya.
- c. Tingginya kredit dan jangka waktu, yang dalam hal ini pemohon kredit menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Pengukuran besar kredit dan jangka waktu dapat dilihat dari *cash flow* serta laporan keuangan tiga tahun terakhir.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara detail cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau yang lainnya.
- e. Jaminan kredit, merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik ada unsur kesengajaan atau tidak.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan.

3. Wawancara 1

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas sudah sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara 1.

5. Wawancara 2

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika terdapat kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan dalam kredit mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pemberian kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat

perjanjian atau pernyataan. Penandatanganan dapat dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran / penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.5 Kerangka Konseptual

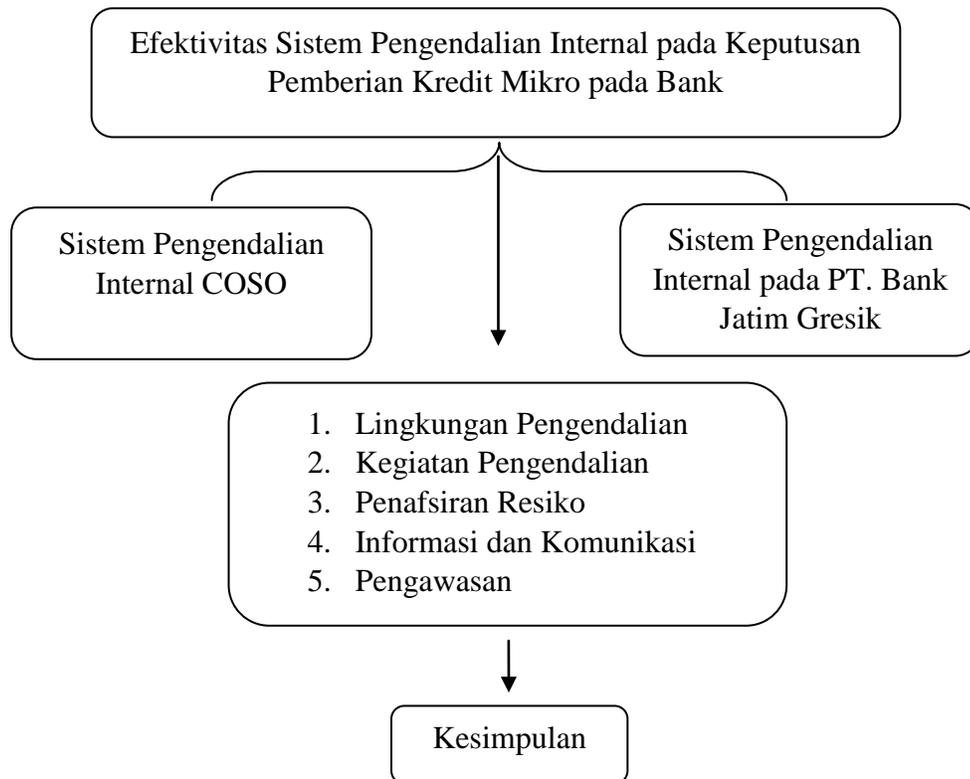
PT. Bank Jatim Gresik adalah salah satu lembaga usaha yang menghimpun dana masyarakat (simpanan) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Pinjaman yang diberikan pada PT. Bank Jatim Gresik ini salah satunya yaitu pinjaman kredit mikro. Pinjaman usaha mikro merupakan suatu pinjaman yang ditujukan kepada para pemilik usaha mikro (kecil) yang membutuhkan dana untuk modal awal atau kelangsungan usahanya.

Namun, salah satu peranan bank tersebut yang memiliki tingkat resiko sering terjadi di tengah masyarakat. Pemberian pinjaman usaha memiliki sebuah resiko yaitu tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan atau biasa disebut dengan kredit macet. Masalah tersebut merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pemberi

kredit (pihak bank). Permasalahan kredit macet ini dapat dihindari dengan adanya pengendalian internal yang efektif dan memadai dalam bidang perkreditan.

Bank memperlihatkan sikap kewaspadaannya, apabila bank tersebut memiliki dan melakukan sistem pengendalian yang efektif dalam keputusan memberikan pinjaman usaha. Serta suatu bank harus mampu meningkatkan efektifitas sistem pemberian kredit dan berusaha untuk meminimalkan adanya risiko kejadian kredit macet.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual